

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, atas rahmat dan karunia Allah S.W.T Pemerintah Aceh dapat melaksanakan program kerja Tahun 2016 sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun 2016 dengan maksimal.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016, maka dengan ini Pemerintah Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menilai kondisi Kas, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2016 ini, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran, memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja tahun 2016.
2. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas per 31 desember 2016.
3. Laporan Arus Kas, memberikan informasi arus kas bersih dari aktivitas operasional, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan, arus kas bersih dari aktivitas non anggaran, sehingga di ketahui kenaikan/penurunan kas selama periode pelaporan, ditambah saldo kas pada bendahara dan saldo kas BLUD
4. Catatan Atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, disertai penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Aceh.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan Aceh. Pemerintah Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, Juni 2017
GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH	1
B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	3
C. LAPORAN OPERASIONAL.....	4
D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
E. NERACA.....	7
F. LAPORAN ARUS KAS	10
G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	13
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	14
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	16
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBA	18
2.1 Ekonomi Makro	18
2.2 Kebijakan Keuangan	24
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBA	26

	HALAMAN
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	28
3.1 Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh	28
3.2 Pencapaian Realisasi Belanja Aceh.....	31
3.3 Pencapaian Realisasi Belanja Modal.....	36
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA	40
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan	40
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	41
4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	41
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	44
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN	73
5.1 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	73
5.2 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	86
5.3 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Operasional (LO) ..	87
5.4 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	100
5.5 Penjelasan atas Akun dalam Neraca.....	108
5.6 Penjelasan atas Akun dalam Laporan Arus Kas (LAK)....	165
BAB VI INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI SERTA UPAYA-UPAYA TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN.....	170
6.1 Informasi Penting dan Kewajiban Kontinjensi.....	170
6.2 Upaya Tindak Lanjut terhadap Temuan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan.....	176
BAB VII PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	182
7.1 Gambaran Umum Provinsi Aceh	182
7.2 Pemerintahan.....	184
7.3 Visi dan Misi Pemerintah Aceh	186
BAB VIII PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	APBA Tahun Anggaran 2012-2016	25
Tabel 3.1	Pencapaian Realisasi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2016 Menurut Kelompok Pendapatan	28
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Menurut Objek Penerimaan Tahun Anggaran 2016.....	30
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	31
Tabel 6.1	Tahapan Penetapan APBA 2016	170
Tabel 6.2	Penerimaan Dana Otsus Tahun Anggaran 2008-2016	171
Tabel 6.3	Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	171
Tabel 6.4	Realisasi JKA Tahun 2010-2016	172
Tabel 6.5	Paket Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang Masih Harus Dibayarkan.....	181
Tabel 7.1	Susunan Satuan Kerja Pemerintah Aceh	185

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Aceh terhadap Nasional.....	20
Gambar 2.2	Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Provinsi Aceh	21
Gambar 2.3	Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional ...	22
Gambar 2.4	Tingkat Inflasi Provinsi Aceh	23
Gambar 3.1	Anggaran dan Realisasi APBA TA 2016.....	28
Gambar 3.2	Kontribusi Pendapatan Aceh Tahun Anggaran 2016.....	29
Gambar 3.3	Profil APBA TA 2016 Berdasarkan Klasifikasi Fungsi	32
Gambar 3.4	Pencapaian Kinerja Menurut Urusan Pemerintahan Aceh	35
Gambar 3.5	Pencapaian Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2016	36



GUBERNUR ACEH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), (3) Laporan Operasional (LO), (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (5) Neraca, (6) Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, Juni 2017
GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah menjadi jelas. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan luas dengan titik berat otonomi diletakkan pada daerah untuk mengelola daerahnya secara lebih mandiri, yaitu pengelolaan urusan rumah tangga maupun pengelolaan keuangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Aceh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menyetujui Qanun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Aceh telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 pasal 100, 101, 102, 103 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh pasal 274, Pemerintah Aceh menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2016 meliputi :

1. **Laporan Realisasi Anggaran**, menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2016, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

1) Pendapatan	: Rp	12.364.563.976.147,33
2) Belanja	: Rp	12.119.713.196.647,07
Surplus	: Rp	244.850.779.500,26
3) Pembiayaan	:	
- Penerimaan	: Rp	288.676.554.172,33
- Pengeluaran	: Rp	70.795.431.626,89
- Pembiayaan Netto	: Rp	217.881.122.545,44

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2016 dengan periode sebelumnya. Dengan realisasi sebagai berikut:

1) Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp	286.676.554.172,33
2) Sisa Lebih Anggaran (SiLPA)	: Rp	462.731.902.045,70
3) Saldo Anggaran Akhir	: Rp	462.731.902.045,70

3. Laporan Operasional, menggambarkan ikhtisar sumber dana, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Aceh tahun Anggaran 2016, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan beban selama periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO	: Rp	12.609.498.734.613,83
2) Beban-LO	: Rp	10.688.510.688.388,75
Surplus dari Operasi LO	: Rp	1.920.988.046.225,08
3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional LO	: Rp	2.897.079.000,00
Defisit Non Operasional LO	: Rp	23.232.390.147,33
4) Defisit dari Kegiatan Non Operasional LO	: Rp	(20.335.311.147,33)
5) Surplus LO	: Rp	1.891.754.533.577,75

4. Laporan Perubahan Ekuitas, menggambarkan pergerakan ekuitas Pemerintah Aceh tahun anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:

1) Ekuitas Awal	: Rp	15.730.372.957.973,06
2) Surplus/Defisit LO	: Rp	1.891.754.533.577,75
3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	: Rp	692.936.433.315,17
4) Jumlah Ekuitas Akhir	: Rp	18.315.063.924.865,98

5. Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Aceh mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2016, sebagai berikut:

1) Aset	: Rp	18.911.685.653.620,31
2) Kewajiban	: Rp	596.621.728.754,33
3) Ekuitas	: Rp	18.911.685.653.620,31

6. Laporan Arus Kas, menggambarkan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas serta saldo kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan aktivitas pendanaan dan aktivitas non anggaran.

Nilai arus kas bersih berdasarkan aktivitas selama satu Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1) Nilai kas bersih dari Aktivitas Operasi	: Rp	2.522.070.746.110,36
2) Nilai kas bersih dari Aktivitas Investasi aset non keuangan	: Rp	(2.336.616.618.764,31)
3) Nilai kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	: Rp	-
4) Nilai kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran	: Rp	-

Saldo kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut:

1) Kenaikan Kas Selama Periode Akuntansi	: Rp	185.454.127.346,05
2) Saldo Awal Kas di BUA & Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp	255.796.790.573,81
3) Saldo Akhir Kas di BUA dan Kas Bendahara Pengeluaran	: Rp	441.250.917.919,86
4) Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	: Rp	47.405.300,00
5) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp	309.142.761,50
6) Saldo Akhir Kas BLUD	: Rp	21.171.841.364,34
7) Saldo Akhir Kas	: Rp	462.779.307.345,70

7. **Catatan atas Laporan Keuangan**, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan, ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBA, serta ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dan kebijakan akuntansi. Selain itu dalam rangka pengungkapan yang memadai, CaLK juga menyajikan informasi tentang penjelasan atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan, informasi penting dan kewajiban kontinjensi yang mempengaruhi laporan keuangan, serta penjelasan informasi-informasi non keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Aceh disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Banda Aceh, Juni 2017
GUBERNUR ACEH

dr. H. ZAINI ABDULLAH